



# Buletin Parlementaria

## Pengintegrasian Kawasan Tanaman Pangan Diperlukan Demi Kesejahteraan Rakyat



3 Serukan  
Kerjasama  
Global untuk  
Penyediaan  
Air Bersih dan  
Sanitasi



4 Komitmen  
Penyelesaian  
Polemik  
Konsumen,  
DPR Kunjungi  
Kawasan Meikarta

Nomor 1235/IV/II/2023 • Februari 2023



9 772614 339005



# Pengintegrasian Kawasan Tanaman Pangan Diperlukan Demi Kesejahteraan Rakyat



FOTO: PRIMA

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (18/2/2023).

Inovasi terhadap suplai kebutuhan pangan akan sangat dibutuhkan di masa depan. Indonesia sebagai negara dengan potensi alam yang berlimpah dan kekayaan kesuburan tanahnya harus mampu berkompetisi dan memenuhi kebutuhannya sendiri demi kemakmuran masyarakat.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerjanya kali ini ke Jawa Tengah, mengapresiasi terobosan pengintegrasian kawasan kelapa genjah dengan tanaman jagung juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan tambahan dari masyarakat khususnya petani itu sendiri. Hadir dalam kunjungan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan pemerintah untuk maksimal dalam memberikan bantuan kepada para petani.

"Selain kelapa ada juga bantuan jagung yang diterima oleh masyarakat. kita harus memastikan

pemerintah jika membantu petani jangan main-main, contohnya yang kita lihat ini jagungnya tidak seperti yang diharapkan. Kita bisa lihat bersama jagung dalam satu hamparan tapi masing masing memiliki perbedaan ukuran ada yang kecil dan besar dan sebagian ada yang rusak," katanya saat kunjungan kerja reses Komisi IV ke Jawa Tengah, Sabtu (18/2).

”

**KITA HARUS MEMASTIKAN PEMERINTAH JIKA MEMBANTU PETANI JANGAN MAIN-MAIN, CONTOHNYA YANG KITA LIHAT INI JAGUNGNYA TIDAK SEPERTI YANG DIHARAPKAN.**

Mengenai hal ini, lanjut Sudin, pihaknya akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Dirjen terkait, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR di masa sidang yang akan datang. "Kita tengarai mungkin benihnya ini di campur atau dioplos dan kita pasti akan meminta penjelasan dari Dirjen terkait saat rapat di Komisi IV, intinya jika berurusan dengan petani ayo kita bekerja sebaik mungkin," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai kawasan pengembangan Kelapa Genjah Sebar (KEJAR) di Bukit Sosogan, Desa Rejosari, Kabupaten Karanganyar, perlu mendapat perhatian khusus guna memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Luluk menuturkan produk turunan dari kelapa genjah yakni gula semut, memiliki peluang pasar yang cukup besar baik itu di lingkup nasional hingga Internasional. Untuk itu, lanjut Luluk, perlu ada langkah konkrit untuk mengejar produksi ketersediaan dari gula semut agar dapat segera memenuhi kebutuhan pasar.

"Kebutuhan dari gula semut secara internasional bahkan pasar domestik pun itu juga sangat besar tetapi ketersediaan yang masih belum cukup banyak. Sehingga kalau misalnya ini dibuatkan kawasan kelapa dan ada dukungan bagi industri misalnya gula semut atau bahkan VCO yang berbasis kelapa saya kira ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru dan memperbesar nilai manfaat dan kesejahteraan bagi petani," terang Luluk. pdt/aha

# Serukan Kerjasama Global untuk Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi



FOTO: IST/PTD

**Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.**

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerjasama global untuk mempercepat pencapaian SDGs bidang air bersih dan sanitasi melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola sangat krusial terutama bagi negara-negara berkembang.

Hal itu disuarakan Puan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum *Parliamentary Hearing* di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 13-14 Februari 2023 dihadiri segenap anggota parlemen dari seluruh negara anggota PBB dan Inter-Parliamentary Union membahas tema *'Water for people and the planet: Stop the waste, change the game, invest in the future.'*

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa di Indonesia penyediaan layanan air bersih merupakan tanggungjawab negara yang mandatnya sekaligus untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan aksesibilitas. "Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting," ujar Puan, Senin (20/2).

Mengingat, untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30 persen dari kebutuhan finansial untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi. Selain itu, Puan juga menyerukan empat hal yaitu peningkatan bantuan negara-negara maju untuk perbaikan infrastruktur dan transfer teknologi, pendanaan global pun/aha



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

### PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

### PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

### W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

### REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

### SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

### ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'adiyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

### FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Geraldii Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

### ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahana, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Komitmen Penyelesaian Polemik Konsumen, DPR Kunjungi Kawasan Meikarta

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari upaya mencari penyelesaian yang dialami oleh para konsumen Meikarta, yang telah berulang kali mengadakan persoalannya ke DPR.

"Kemarin keluhan dari konsumen ke beberapa komisi (DPR) yang pada akhirnya kita terima. Pada hari ini kami sudah melakukan kunjungan untuk mengecek fakta lapangan, lalu kami sudah mengadakan dialog dengan manajemen. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh konsumen sudah diakomodir oleh manajemen," ujar Dasco di sela kunjungannya, Selasa (14/2).

Diketahui, konflik yang terjadi antara konsumen dan pengembang Meikarta menimbulkan berbagai polemik. Puncaknya, puluhan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengadu ke DPR RI pasca dilayangkannya gugatan oleh pengembang proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang juga anak usaha PT Lippo Cikarang kepada 18 konsumen.

Pencabutan gugatan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Ketut Budi Wijaya yang menyampaikan dalam Rapat Dengar



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Pendapat Umum (RDPU), Senin lalu (13/1). Karena itu, Dasco meminta kepada Komisi III yang membidangi masalah Hukum agar ikut memantau pencabutan gugatan tersebut.

Masalah lain yang dibahas pada kunjungan tersebut adalah permintaan pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh konsumen terhadap 130 unit apartemen yang telah dibeli. Permintaan pengembalian dana tersebut lantaran sejak 2017 hingga kini pembangunannya belum juga rampung. Pada kesempatan tersebut, Dasco menegaskan, bahwa tidak ada skema pengembalian dana secara langsung. Meski begitu, konsumen tetap bisa mendapatkan kembali

uangnya setelah unit tersebut laku di pasar sekunder melalui proses titip jual yang dilakukan oleh manajemen.

Dasco menegaskan untuk menghindari polemik serupa, DPR akan tetap akan memantau pembangunan Meikarta melalui komisi-komisi terkait. Ia juga mengatakan bahwa pendampingan akan tetap dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pembeli. "Kami dari DPR RI dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit-unit yang sudah selesai dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi," tukasnya.

[uc/rdn](https://www.ri.go.id/uc/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Rachmat Gobel Perjuangkan Perlindungan Bagi PRT

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima Koalisi Masyarakat Sipil serta Jaringan Advokasi Nasional yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2). Ia hadir didampingi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansyah serta Taufik Basari.

Bertepatan dengan Hari PRT Nasional yang jatuh pada 15 Februari, Gobel menyambut baik usulan untuk segera dibahas dan disahkannya RUU PPRT menjadi UU. Ia mengatakan negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk PRT yang menggantungkan hidupnya pada sektor domestik.

Menurut Gobel, peran PRT sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dimana mereka bekerja. Lebih lanjut, ia berharap RUU PPRT juga ditujukan untuk membangun situasi dan hubungan kerja yang saling memanusiakan, mendukung dan melindungi pekerja dan pemberi kerja. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Sisi lain, Gobel menambahkan, RUU PPRT krusial untuk dibahas karena berkaitan dengan jaminan hukum pekerja domestik di luar negeri yang seharusnya telah memiliki perlindungan hukum di dalam negeri. "Untuk itu, Perlindungan ini harus dimulai dari rumah sendiri. Supaya saat mereka bekerja di luar negeri



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menerima Koalisi Masyarakat Sipil serta Jaringan Advokasi Nasional yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

mereka juga terlindungi. Kalau di Indonesia ga ada perlindungan, di luar negeri juga dianggap biasa-biasa aja," terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Senada, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari

”

**UNTUK ITU, PERLINDUNGAN INI HARUS DIMULAI DARI RUMAH SENDIRI. SUPAYA SAAT MEREKA BEKERJA DI LUAR NEGERI MEREKA JUGA TERLINDUNGI. KALAU DI INDONESIA GA ADA PERLINDUNGAN, DI LUAR NEGERI JUGA DIANGGAP BIASA-BIASA AJA.**

menyampaikan komitmen Fraksi Partai NasDem dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor domestik. "Pekerja Rumah Tangga seringkali termarginalkan dan rentan menjadi korban kekerasan. Karena itu, kita dari awal mendukung sekali dan turut melobi fraksi lain untuk mendukung bersama RUU PPRT ini," kata Tobas sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Perwakilan Koalisi Sipil Masyarakat Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, RUU PPRT menjadi kebutuhan mendesak untuk segera disahkan. Ia mencatat, ada sekitar 4 juta hingga 5 juta pekerja sektor domestik yang didominasi 85 persen oleh perempuan dan sisanya merupakan anak-anak. Mayoritas adalah perempuan yang berasal dari warga miskin dan menjadi tulang punggung dan penopang perekonomian.

ann/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi I dan Pemerintah Bakal Bentuk Tim Panja Revisi Kedua UU ITE

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

mengungkapkan Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan membuat tim panitia kerja (panja) terkait revisi kedua Undang-Undang ITE. Ia menyampaikan Komisi I baru saja menerima penjelasan dari pemerintah dan akan mempelajarinya bahannya lebih lanjut.

Hal itu disampaikan Abdul Kharis usai Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo RI dan Menkumham RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta. Raker tersebut membahas penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kami telah selesai melakukan Raker dengan Menkominfo dan Menkumham, dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Menkominfo hadir sendiri. Kami mendengarkan penyampaian pemerintah atas rencana rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang ITE," ungkap Kharis usai Raker, Senin (13/2).

Dirinya menjelaskan, setelah membuat tim panja, DPR RI akan menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) sandingan dari berbagai fraksi yang nantinya akan dikompilasi



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pemerintah, yang diwakili oleh Menkominfo RI dan Menkumham RI.

”

**KITA MUNGKIN AKAN PANGGIL BEBERAPA MUNGKIN PAKAR JUGA ATAU MUNGKIN PARA PELAKU ITE YANG ADA DI YANG ADA DI INDONESIA, MUNGKIN MEREKA AKAN MEMBERIKAN MASUKAN TENTANG BAGAIMANA AGAR UNDANG-UNDANG REVISI PERUBAHAN KEDUA ITU BISA MENJADI LEBIH BAIK.**

dan kemudian dikirim ke pemerintah. Setelahnya, baru akan dilaksanakan rapat panja.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mungkin akan mengundang beberapa pakar maupun pelaku yang terlibat dengan ITE guna menerima masukan masukan dari masyarakat. "Kita mungkin akan panggil beberapa mungkin pakar juga atau mungkin para pelaku ITE yang ada di yang ada di Indonesia, mungkin mereka akan memberikan masukan tentang bagaimana agar undang-undang revisi perubahan kedua itu bisa menjadi lebih baik," tutup Politisi Fraksi PKS itu. **hal/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# KPU Harus Buat Desain Besar Pemecah Masalah Tahapan Pemilu

**A**nggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai persoalan yang dialami KPU dan Bawaslu di daerah ternyata sama dengan apa yang dialami KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. Oleh karenanya dirinya meminta KPU Pusat segera membuat desain besar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, dimana persoalan klasik yang terus berulang terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), KTP Elektronik, dan juga persoalan sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia di dalamnya.

"KPU Pusat harus membuat desain besar untuk menyelesaikan masalah itu, masalah KTP, masalah daftar pemilih, dan masalah SDM Panwas, dan masalah lainnya seperti sarpras, masalah peraturan-peraturan, itu semuanya tentunya akan menghambat pemilu atau membuat kualitas pemilu tidak baik, oleh karena itu harus diatasi secara bersama-sama," katanya kepada **Parlementaria** di Serang, Banten, Selasa (14/2).

Politisi Fraksi PKB ini juga meminta KPU Pusat melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan

KPU Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun pemerintah pusat agar masalah-masalah yang ada tersebut terus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya.

Meskipun beberapa waktu lalu Komisi II DPR RI telah melakukan konsinyering dan melakukan pertemuan dengan seluruh pemangku kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, hanya saja hasil yang disimpulkan bersifat general, sehingga dibutuhkan pertemuan lagi untuk membahas ini secara tuntas.

"Kemarin kan secara umum ya ada usulan ini, tanggapan ini, reaksi ini, aspirasi ini, sekarang kita kupas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan, dengan tentunya memanggil semua yang terlibat, Kemendagri, Kemenkeu termasuk yang membuat pemilu ini sukses itu menurut saya dari tangan presiden juga, ketika itu sudah dirumuskan permasalahannya kemudian kita sudah mendapatkan alternatif solusinya kita ajukan kepada presiden, bahwa seperti ini solusinya," tandasnya.

Moh.Toha juga menyatakan apa yang terjadi di daerah adalah cerminan dari seluruh Indonesia, hanya saja mungkin persentasenya berbeda-beda, namun secara masalah hampir semuanya sama, dimulai dari KTP Elektronik hingga DPT, dimana kedua hal ini memiliki dinamikanya sendiri dan berubah-ubah secara dinamis setiap harinya. Oleh karena itu menjelang pemilu Toha meminta, seluruh pihak mengerahkan segala kekuatan dan SDM juga fasilitas yang ada, agar dapat memecahkan masalah-masalah itu. **ndy/aha**



FOTO:INDY/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat kunjungan kerja di Serang, Banten, Selasa (14/2/2023).

# Bagus Adhi Optimis Bali Punya UU Provinsi yang Baru

**A**nggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang telah sepakat untuk membahas RUU 8 Provinsi, termasuk Bali dalam rapat kerja tingkat satu. Ia pun optimis dan mendukung penuh agar ditetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali menjadi Undang-Undang.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada bapak Menteri Dalam Negeri di dalam rapat tingkat satu ini semua sudah berjalan lancar dan terlebih-lebih yang secara khusus saya mengapresiasi sikap yang luar biasa negarawan yang secara pemikiran pluralis memberikan satu gambaran bagaimana pentingnya Provinsi Bali diatur dengan Undang-Undang Provinsi Bali yang baru," jelas Bagus Adhi usai rapat kerja, Jakarta, Senin (13/2).

Menurutnya, penting untuk menonjolkan karakteristik Provinsi Bali dalam pemerintahannya dan juga juga pelestarian budaya di Provinsi Bali karena hal tersebut merupakan magnet besar bagi Bali sehingga dapat dikenal di dunia. "Nah di dalam undang-undang yang baru sudah dipaparkan pentingnya pelestarian budaya guna menunjang pariwisata, pariwisata bagus maka pendapatan belanja negara akan meningkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap dalam pembahasan RUU Provinsi Bali nanti berjalan lancar demi keutuhan Pancasila dan NKRI. "Nah inilah mudah-mudahan pembahasan selanjutnya dari bab per bab dan



Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra usai Rapat Kerja tingkat satu dengan Mendagri, Menkeu, Menteri PPN/Ka. Bappenas, Menkumham, dan Komite I DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (13/2/2023).

”  
**PENTING UNTUK MENONJOLKAN KARAKTERISTIK PROVINSI BALI DALAM PEMERINTAHANNYA DAN JUGA JUGA PELESTARIAN BUDAYA DI PROVINSI BALI KARENA HAL TERSEBUT MERUPAKAN MAGNET BESAR BAGI BALI SEHINGGA DAPAT DIKENAL DI DUNIA.**

pasal per pasal kami harapkan dalam perjuangan Provinsi Bali ini bisa berjalan lancar demi keutuhan Pancasila dan Negara Republik Indonesia yang tentunya didukung dengan semakin marak dan gempitanya budaya yang ada di Bali sehingga dibantu oleh pariwisata itu sendiri," tambahnya.

Diketahui delapan provinsi yang akan dibahas RUU nya adalah Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Terkhusus Bali, akan dilakukan pendalaman oleh Komisi II terkait usul dari Pemerintah Bali agar memasukan Bali sebagai daerah yang punya 'kekhasan' sebagai daerah pariwisata. [we/aha](https://www.aha.com)



# Komisi III Setujui Adies Kadir Menjadi Ketua Panja RUU MK



FOTO: EOT/PDT

Rapat Komisi III dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

**R**apat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkopolkum RI dan MenkumHAM RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyepakati Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi dari meja pimpinan mengusulkan yang pegang panja ini Pak Adies Kadir. Setuju?" tanya Pacul sapaan akrab Ketua Komisi III. "Setuju," jawab para anggota Komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2)

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhan memaparkan empat materi penting dalam revisi atau perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang diusulkan oleh DPR RI. "Beberapa pokok materi penting dalam perubahan keempat UU MK, antara lain pertama, persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi. Kedua, evaluasi hakim konstitusi," ujar Habiburokhan.

Materi ketiga dan keempat yang akan dibahas dalam revisi UU MK itu adalah persoalan mengenai unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan sama, Habiburokhan juga menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi DPR RI mengusulkan dilakukannya revisi UU MK.

Berikutnya, dia menyampaikan revisi UU MK ditujukan untuk menyesuaikan aturan tersebut dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

"Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 Tahun 2003 tentang MK sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan," papar Habib.

Pada kesempatan yang sama Menkopolkum Mahfud MD yang mewakili pemerintah mengatakan pihaknya mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). "Besar harapan kami agar kiranya RUU dapat segera dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setelah penyampaian ini, Izinkan saya sampaikan naskah yang saya bacakan disertai Daftar Isian Masalah yang sudah kami siapkan ke sidang yang terhormat ini," papar Mahfud.

— ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Legislator Minta Bulog NTB Siap-Siap Hadapi Masa Panen

**A**nggota DPR RI Komisi IV I Made Urip meminta kepada Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersiap-siap menghadapi masa panen. Hal itu diungkapkan I Made Urip saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Lombok, Provinsi NTB.

"Paling tidak (Bulog) membeli gabah hasil dari pada hasil petani kita. Sehingga, harga gabah itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja itu tidak di bawah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)," kata I Made kepada **Parlementaria**, di NTB, Jumat (17/2).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga berharap sirkulasi beras yang ada di Lombok NTB bisa berjalan dengan baik. "Kita sudah meninjau tentang Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

yang ada di Bulog, dan juga melihat hamparan sawah di Lombok, ini luar biasa," ucapnya.

Dalam kunjungannya tersebut, I Made Urip juga bertemu dengan para pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan seperti PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Sumbawa Timur Mining untuk membahas soal pertambangan. "Itu para investor sudah melakukan kerja-kerja konkret, terutama berkaitan dengan bagaimana menata ekosistem dan lingkungan, terutama *tailing*-nya misalnya, kemudian limbahnya, sudah dibidik dengan baik," katanya.

Sehingga, dia menegaskan sudah adanya kontribusi dari para perusahaan itu bagus ke depannya, berkaitan dengan penataan ekosistem dan lingkungan. "Apalagi sudah dilakukan dengan reboisasi,

penghijauan kembali di sekitar tambang itu. Terutama penanganan pasca tambangnya. Ini bagus sekali. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan," bebernya.

I Made Urip juga memaparkan soal desa dengan basis budidaya ikan di wilayah NTB, yang menerapkan prinsip *One Spirit One Product*. Pihaknya ingin mendorong pemerintah desa di wilayah tersebut agar dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi warga sekitar.

"Jadi, kita ingin mendorong kepada pemerintah supaya desa-desa yang lain juga mengikuti, kerja-kerja konkret seperti ini. Terutama dengan pengembangan budi daya perikanan ikan nila ini. Jadi, barangkali itu yang ingin saya sampaikan." pungkasnya.

— aas/rdn



FOTO: AAS/PDI

Anggota DPR RI Komisi IV I Made Urip pada sesi foto bersama usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Lombok, Provinsi NTB.



# Indonesia Rawan Gempa, Legislator Minta Pendidikan Bencana Sejak Dini Digencarkan

**A**nggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta pemerintah untuk menggencarkan pendidikan kebencanaan sejak dini. Hal tersebut ia ungkapkan usai Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku. Dalam kunjungan itu ia menemukan banyak daerah di Indonesia yang rawan gempa.

Provinsi Maluku kata Sigit juga harus menjadi perhatian. Sebab, di Provinsi Maluku sudah beberapa kali dilanda gempa bumi. Baru-baru

ini, pada bulan Januari yang lalu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar diguncang gempa berkekuatan 7,2 skala richter.

"Pendidikan sejak dini kalau di sekolah-sekolah di luar negeri mungkin sudah diajarkan, khususnya di Jepang, daerah bencana. Nah, itu harus kita lakukan juga di sini, terutama daerah-daerah gempa seperti Maluku dan kawasan-kawasan kepulauan ini, karena selalu berhubungan itu gempa dan bisa jadi dampaknya ke tsunami," ujarnya, Sabtu (18/2).

Sigit mengusulkan, setiap sekolah diberi kesempatan secara bergantian untuk bisa datang ke

sekolah lapangan BMKG. Sigit menilai keberadaan sekolah itu sangatlah baik. Ia pun mendorong agar pemerintah memperbanyak keberadaannya.

"Sekolah-sekolah lapang gempa oleh BMKG perlu segera dibuat, perlu diperbanyak, kalau perlu anggarannya diperbanyak sekolah-sekolah lapan, karena Indonesia ini daerah aktif, sesar aktif, banyak sekali gempa," ujarnya.

Untuk diketahui, ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia rawan gempa bumi. Salah satunya, Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api (*ring of fire*). Bumi Nusantara menjadi tempat bertemunya tiga lempengan tektonik yang ada di muka bumi. Maka itu, Sigit menilai Indonesia sudah seharusnya memiliki kapasitas dalam penanganan pra hingga pasca terjadinya gempa bumi.

— rdn/aha

”

**SEKOLAH-SEKOLAH LAPANG GEMPA OLEH BMKG PERLU SEGERA DIBUAT, PERLU DIPERBANYAK, KALAU PERLU ANGGARANNYA DIPERBANYAK SEKOLAH-SEKOLAH LAPAN, KARENA INDONESIA INI DAERAH AKTIF, SESAR AKTIF, BANYAK SEKALI GEMPA.**



FOTO: NDN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Produk Minyakita Langka, Komisi VI Akan Panggil Kemendag

**A**nggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Komisi VI akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan naiknya harga Minyakita yang kini mencapai Rp16.000-Rp17.000. Padahal HET minyak goreng dengan merek dagang milik Kemendag itu adalah Rp14.000.

"Jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. ini PR (Pekerjaan Rumah), untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendag dan Mendag juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan kita bisa diselesaikan," ujar Andre kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Andre menambahkan, permasalahan minyak goreng harus dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebab, jika tidak, permasalahan ini akan menjadi bola salju dan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April 2023 mendatang.

"Kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi 'guliran bola salju' karena kita akan masuk di Ramadhan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Nah untuk itu kita (Komisi VI) akan panggil Menteri Perdagangan," imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.



Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

FOTO: OJI/PDT

Lebih lanjut, Legislator Dapil Sumatera Barat I ini mengatakan akan menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi

”

**KALAU FEBRUARI INI NGGAK SELESAI INI AKAN JADI 'GULIRAN BOLA SALJU' KARENA KITA AKAN MASUK DI RAMADHAN DAN LEBARAN YANG DIMANA PERMINTAANNYA AKAN LEBIH BANYAK, KONSUMSI MASYARAKAT AKAN LEBIH BANYAK. NAH UNTUK ITU KITA (KOMISI VI) AKAN PANGGIL MENTERI PERDAGANGAN.**

permasalahan tersebut. Pihaknya pun berharap permasalahan minyak goreng ini dapat segera diselesaikan di bulan Februari ini.

"Kami Komisi VI akan terus mengawasi, mengingatkan, dan mendukung pemerintah agar ini (minyak goreng) tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita negara produsen CPO terbesar di dunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah," lanjutnya.

Diketahui, Kemendag menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dimana isinya diantaranya adalah dilarangnya Minyakita dijual dengan sistem *bundling*, kemudian pembelian Minyakita juga dibatasi sebanyak 2 liter per orang per hari. Sementara pembelian minyak goreng curah dibatasi sebanyak 10 liter per orang per hari. **bia/aha**



# PLTU Belawan Diharapkan Jadi Pembangkit Listrik Unggulan di Sumut

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Heryadi berharap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sicanang, Belawan, dapat menjadi pembangkit listrik unggulan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebab, PLTU yang telah bekerja sama dengan kapal pembangkit listrik *Marine Vessel Power Plant* (MVPP) milik Turki ini, telah melakukan transisi energi dari listrik yang bersumber dari batu bara menjadi gas (energi bersih).

"(Sehingga) ke depan bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan. Kita lihat transisi PLTU ke gas dan ini menjadi pokok pengawasan kami dan ini sudah dilaksanakan cukup baik sejauh ini. Kami mendorong PLN dalam hal ini PLTU Belawan ini lebih meningkatkan transisinya dari batu bara ke energi bersih. Bahkan ke depan PLN ini menjadi salah satu pembangkit listrik unggulan di Sumut ini," ujar Bambang usai pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PLTU Sicanang, Belawan, Sumatera Utara, Senin (13/2).

Sehubungan dengan hal itu, tambahnya, maka Komisi VII DPR RI yang membidangi salah satunya sektor energi, memandang perlu untuk menjadikan PLTU Sicanang Belawan di Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai objek Kunjungan Kerja Spesifik Panja Listrik Komisi VII DPR RI. "Komisi



FOTO: RDN/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Heryadi usai pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PLTU Sicanang, Belawan, Sumatera Utara, Senin (13/2/2023).

”

**KOMISI VII DPR RI INGIN MENDALAMI TERKAIT VOLUME TRANSMISI, HARGA LISTRIK, SERTA KENDALA DAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENGELOLAAN PLTU SICANANG BELAWAN. KUNJUNGAN INI DILAKUKAN SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN KOMISI VII DPR RI DALAM SEKTOR ENERGI DI INDONESIA.**

VII DPR RI ingin mendalami terkait volume transmisi, harga listrik, serta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan PLTU Sicanang Belawan. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Komisi VII DPR RI dalam sektor energi di Indonesia," tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Diketahui, MVPP yang bekerja sama dengan PLTU Belawan ini menyediakan sekitar 240 MW sebagai tambahan daya. Tambahan daya tersebut diperkirakan mampu menyediakan listrik sekitar 2.287 MW pada saat beban puncak tertinggi yaitu 2.075 MW. Dengan adanya kapasitas tersebut, Sumatera bagian Utara dapat memiliki cadangan daya sekitar 212 MW. Pasokan listrik ini disalurkan melalui instalasi listrik PLTU Sicanang Belawan. rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VII DPR RI Apresiasi Akselerasi Pembangunan Smelter PT BAI

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengapresiasi

PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) atas progres pembangunan proyek smelter. Diketahui, progres pembangunan smelter tersebut per Februari 2023 mencapai 22 persen, dengan target 80 persen pada akhir tahun 2023. Apresiasi ini disampaikan Maman, pasalnya, sudah sekitar dua tahun proyek tersebut tertunda.

"Kurang lebih dua tahun pembangunan smelter ini tertunda karena ada perselisihan dalam penanganan proyek EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) dari smelter ini, yaitu antara pihak Chalico (China) dan PT PP (Persero)," kata Maman saat diwawancarai

**Parlementaria**, usai Tim Panja Bauksit Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) di Smelter Grade Alumina Refinery, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/2).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan tujuan Tim Panja Bauksit ke PT BAI adalah memantau realisasi akselerasi pembangunan smelter PT BAI. Ia menegaskan akselerasi ini dibutuhkan untuk mengejar tenggat waktu Juni 2023, di mana pada waktu tersebut tidak diperbolehkan ekspor mineral, salah satunya bauksit.

"Tentunya hal ini akan memiliki konsekuensi-konsekuensi terhadap perekonomian di daerah, berarti mau tidak mau konsekuensinya adalah smelter-smelter yang sudah direncanakan itu harus segera



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin pertemuan Tim Panja Bauksit dalam rangka Kunspik Komisi VII DPR RI di Smelter Grade Alumina Refinery, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/02/2023).

teralisasi. Syukur alhamdulillah hasil temuan kita di lapangan proyek yang hampir dua tahun lalu baru 12 persen pembangunannya, setelah melakukan rapat maraton dengan pihak terkait sekarang progresnya (kini) sudah bisa kita nyatakan bergerak kembali," ungkap Maman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BAI Leonard Manurung mengatakan pembangunan smelter tersebut dinilai sangat progresif. Sebab, pihaknya mendapatkan konsorsium Chalico (China) dan PT PP (Persero). "Mereka melakukan pekerjaan yang sangat masif dan tentunya ini

berkat dukungan dari kita semua secara khusus dari Komisi VII DPR yang mendukung dan mendorong terus sehingga kami bisa melanjutkan proyek ini, dan tentunya proyek ini kita harapkan bisa selesai di kuartal ketiga tahun 2024," kata Leonard.

Ia meyakini *multiplier effect* pembangunan ini dapat memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah. Nantinya, akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang akan terlibat dalam beberapa aktivitas usaha tersebut. [cas/rdn](https://cas.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VIII Harap Penerima Bantuan PKH di Langkat Lebih Sejahtera

**K**omisi VIII DPR RI berharap masyarakat yang menerima bantuan sosial, khususnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), menjadi sejahtera dan mandiri. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Syah Afandin.

"Komisi VIII mendorong untuk mengeluarkan masyarakat penerima bantuan PKH menjadi orang yang bisa tidak membutuhkan bantuan," ungkap Marwan di Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/2). Anggota DPR Fraksi PKB itu menilai program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah memang bukan solusi tuntas untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, terutama kemiskinan struktural. Walaupun begitu, baginya bansos tetap dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk bantuan perumahan yang layak.

Selain bansos tetap dilaksanakan, ia mendorong sekaligus menargetkan pemerintah melalui Kementerian Sosial agar membuat terobosan untuk menurunkan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial, sambil tetap memastikan bantuan sosial yang diberikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Paling tidak kita targetkan mulai 1 periode,



FOTO: SCN/PDT

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR di Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/02/2023).**

minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan PKH," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Langkat Syah Afandin berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait permintaan RST di Kabupaten Langkat dapat disampaikan ke pusat. "Kita berharap, karena disini

jumlah penduduknya banyak, tentu permintaannya juga banyak. Paling tidak 2.000 unit (RST) bisa ditempatkan di Kabupaten Langkat," ujarnya.

Diketahui, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Langkat saat ini masih di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Di mana persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat pada tahun 2022 sebesar 9.49 persen, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 8.42 persen. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Langkat saat ini masih membutuhkan penambahan jumlah Kartu Indonesia sehat (KIS) yang sesuai dengan jumlah penduduk. Hal tersebut mengingat presentasi KIS saat ini baru mencakup 30 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Langkat. **rr/rdn**

”

**KOMISI VIII MENDORONG UNTUK MENGELUARKAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PKH MENJADI ORANG YANG BISA TIDAK MEMBUTUHKAN BANTUAN.**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Pesatnya Pariwisata Jangan Sampai Meninggalkan Persoalan Sosial di Labuan Bajo

**T**im Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan jangan sampai pembangunan masif di sektor pariwisata, meninggalkan persoalan di sektor sosial masyarakat yang tak kunjung diselesaikan.

"Seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial, yang justru sekarang dimajukan wilayah ini terutama sektor pariwisata yang tinggi. Jadi, persoalan sosial juga jangan sampai tidak diperhatikan. Ini salah satu tujuan kunjungan Komisi VIII ke sini agar persoalan sosial perlu mendapatkan perhatian khusus," ujar Diah di sela-sela pertemuan dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat, Perwakilan Kemenag RI, BNPB, dan BPKH, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Jumat (17/2).

Beberapa persoalan sosial yang disoroti Komisi VIII antara lain kasus stunting, kekurangan air, kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Terkait dengan pemasangan bagi ODGJ, Diah mengusulkan adanya panti atau rehabilitasi sosial, sehingga persoalan sosial ini punya ruang. "Misalnya, ODGJ di sini seharusnya ada rumah sakit jiwa. Sehingga, semoga adanya



FOTO: RDN/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat menyerahkan bantuan sosial program keluarga harapan bersama Kemensos di sela-sela Kunjungan Kerja Reses ke Labuan Bajo.

panti atau *shelter* yang bisa menjadi tempat penampungan apabila keluarganya tidak mengurus," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Karena itu, ia mendorong Kementerian Sosial untuk membangun pusat rehabilitasi sosial di Labuan Bajo. Untuk penanganan stunting, ia berharap adanya integrasi anggaran. Oleh karena, menurutnya, problem stunting ini tidak bisa ditangani secara parsial, tapi yang penting juga pendampingan dan pemahaman masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR bersama

Kementerian Sosial turut menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20.887 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 74,781 miliar lebih, bantuan trailer angkutan air bersih untuk BPBD Kabupaten Manggarai Barat, dukungan bantuan pembiayaan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan, DAK Non-Fisik bantuan perlindungan dan anak tahun anggaran 2023 sebesar Rp438.800.000, bantuan Komisi VIII dan Kemensos RI Program Kereserian Sosial Tahun 2023 sebesar Rp150.000.000, dan penyerahan bantuan atensi sebesar Rp114.000.000. 

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Dukung Implementasi Teknologi Wolbachia Demi Tanggulangi Penyakit Dengue di Bali

**D**alam rangka upaya pengendalian Demam Berdarah Dangu (DBD), Pemerintah Provinsi Bali telah memulai langkah-langkah untuk mengimplementasikan Inovasi Teknologi bakteri Wolbachia untuk Penanggulangan Dengue. Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana mendukung penerapan teknologi Wolbachia untuk penanggulangan dengue di Provinsi Bali. Menurutnya, hal ini amat penting dilakukan karena dengue merupakan penyakit dengan kasus tinggi yang selalu terjadi setiap tahunnya di setiap daerah.

"Setiap tahunnya itu kan kasus dengue tinggi sekali. Pemerintah Bali bekerja sama dengan *World Mosquito Program* (WMP) dengan dukungan dari

Pemerintah Australia dan Gillespie Family Foundation, bersama-sama mewujudkan "Bali anti dengue" dengan menggunakan metode Wolbachia," jelas Ketut Kariyasa usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan ke Fasilitas produksi nyamuk ber-Wolbachia, Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu, (18/2).

Untuk diketahui, hingga saat ini, metode Wolbachia telah diimplementasikan di 12 (dua belas) negara di seluruh dunia. WMP dan Pemerintah Daerah Bali akan melepaskan nyamuk ber-Wolbachia di seluruh wilayah perkotaan di Bali pada tahun 2023-2025 untuk melindungi sekitar tiga juta penduduk dari penyakit dengue.

Oleh karena itu, Ketut, sapaan

akrabnya, mengatakan bahwa penerapan metode Wolbachia adalah langkah yang tepat. "Karena metode ini menawarkan solusi terbaik untuk menghilangkan penyakit dengue," jelas Legislator dari Dapil Bali itu.

Hal itu dibuktikan dari data yang dikeluarkan oleh WMP. Yakni sejak tahun 2014 WMP diterapkan di Indonesia, WMP telah melindungi hampir dua juta orang dari dengue dan penyakit lainnya yang ditularkan oleh nyamuk di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul. Serta didukung dengan hasil dari penelitian yang dilakukan WMP tahun 2018-2020 di Yogyakarta dengan standar yang tinggi, membuktikan bahwa metode Wolbachia berhasil. **hnm/rdn**



FOTO: HNM/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana dalam foto bersama usai melakukan kunjungan ke Fasilitas produksi nyamuk ber-Wolbachia, Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu, (18/02/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Ledia Hanifa Minta Penedukasian Suporter Harus dari Masing-Masing Klub



FOTO: GYS/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/02/2023).

**A**nggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta proses penedukasian suporter harus berasal dari masing-masing klub. Hal itu dalam rangka menanggapi keributan yang terjadi baru-baru ini antara suporter klub PSIS melawan Persis Solo yang terjadi di luar area Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Karena itu, ia meminta para pemangku kepentingan terkait agar ikut serta terlibat aktif dalam melakukan edukasi suporter dari klub sepak bolanya sendiri. Termasuk, saat klub bola masing-masing tersebut memberitahukan terkait pembelian tiket dan prosedur saat masuk ke dalam arena stadion.

"Kita ini kan paling sedih kalau

nonton sepak bola habis (pertandingan) itu kerusuhan penonton, yang perlu kita ketahui edukasi ini penting karena ada dua tim yang fanatik dan tidak, mungkin bisa dimulai dari klub itu sendiri," jelas Ledia usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/2)

Seperti diketahui sepakbola Indonesia saat ini sedang dilakukan evaluasi, akibat dari adanya tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurutnya, berbagai aspek harus dibenahi agar kejadian serupa tak terulang. Karena itu, suporter tentu menjadi salah satu aspek yang masuk dalam transformasi sepak bola Indonesia, di samping juga evaluasi dalam tubuh PSSI selaku federasi sepak bola Tanah Air.

"Nah, ini perlu kita pelajari, seperti

negara Italia dalam menata suporter sepak bola, dimulai dari pertama pendaftaran, duduk sesuai dengan klub bola mana yang dia dukung, serta pengamanan yang sangat ketat, suporter juga perlu beri arahan yang jelas," tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Dengan demikian, proses penedukasian ini perlu mendapat dukungan dari klub sepak bola untuk membina para suporter agar dapat berjalan dengan baik, dan tidak terulang lagi bentrok. "Berharap pembinaan berjalan dengan baik dari segi seleksinya dan kemudian juga dengan berkelanjutan nggak putus dan kemudian mendorong supaya klub-klub sepakbola juga melakukan pembinaan dengan baik terutama anak-anak Indonesia," tutupnya.

 gys/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Peran DJBC Sebagai Pelindung Masyarakat dari Rokok Ilegal Perlu Dioptimalkan

**K**ementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu menyiapkan *roadmap* untuk mengoptimalkan perannya sebagai pelindung masyarakat (*community protector*). Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah yang meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menekan peredaran rokok ilegal.

"Bea Cukai juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *community protector* dengan turut andil mengawasi dan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal? Kira-kira seperti apa *roadmap* DJBC yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan peran Bea Cukai



FOTO: MURI/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

”

**PEMERINTAH TIDAK BISA TERUS MENERUS MENEKAN IHT DENGAN MENAIKAN TARIF CUKAINYA SAJA. KONSEKUENSI DARI KENAIKAN CUKAI YANG EKSESIF TIDAK HANYA BERDAMPAK NEGATIF PADA KEBERLANGSUNGAN IHT.**

sebagai *community protector* di tahun ini?" tanya Siti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam pertemuan tersebut, Politisi Partai Demokrat itu juga mengaitkan peredaran rokok ilegal dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau. Menurutnya, kenaikan cukai tak hanya berdampak negatif bagi Industri Hasil Tembakau (IHT), namun juga memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini kemudian justru

akan berpotensi membuat hilangnya penerimaan negara dari rokok legal.

"Pemerintah tidak bisa terus menerus menekan IHT dengan menaikkan tarif cukainya saja. Konsekuensi dari kenaikan cukai yang eksekutif tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan IHT. Tetapi juga memicu semakin banyaknya peredaran rokok ilegal, yang mana justru dapat menjadi bumerang bagi penerimaan pemerintah berupa hilangnya potensi penerimaan negara," ujarnya.

Agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara tanpa terlalu membebani IHT dari cukai hasil tembakau, menurutnya, pemerintah harus menemukan beberapa alternatif kebijakan. Legislator dapil Jawa Barat XI ini menyarankan pemerintah agar dapat meningkatkan dasar penerimaan pajak maupun menerapkan cukai pada produk lainnya.

"Pemerintah perlu meningkatkan *tax base* atau barang lain yang kena Cukai. Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen bisa sampaikan mengenai alternatif penerimaan Cukai pemerintah selain CHT," tambah Siti Pada kesempatan yang sama, ia juga sempat menanyakan evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dalam mengoptimalkan penyaluran dana bagi peningkatan petani tembakau di daerah. Menurutnya penting untuk dibahas secara transparan. uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



# APBN 2023 Belum Berjalan, Legislator Pertanyakan Kebijakan ‘Automatic Adjustment’

**A**nggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mempertanyakan alasan diterbitkannya kebijakan *automatic adjustment* (penyesuaian otomatis anggaran) di saat belum berjalannya APBN 2023. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dimaknai dua hal, yaitu antara antisipasi penghematan lebih dini atau perencanaan anggaran yang kurang akurat.

"Ini antisipasi penghematan lebih dini atau perencanaan yang sebenarnya kurang akurat? Baik asumsinya, perhitungannya dan seterusnya. Karena APBN belum dijalankan, undang-undang 28 tahun 2022 (belum dijalankan) namun sudah *adjustment*," tanya Hendrawan dalam

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Sebelumnya, Menteri Keuangan RI melayangkan Surat nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, perihal *automatic adjustment* belanja kementerian/ lembaga tahun anggaran 2023.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa tak jarang ia mengalami kesulitan menjelaskan mengenai *automatic adjustment* kepada kepala daerah di Dapilnya. Karena itu, dalam RDP tersebut pula, ia menanyakan kepada Dirjen Anggaran itu mengenai alasan dilakukan *automatic adjustment*, terlebih jika hal tersebut kembali terjadi di masa yang akan datang.

"Waktu saya ditanya oleh sejumlah kepala daerah, yang kita tahu transfer daerahnya semakin berkurang. Pak Isa, mohon nanti *automatic adjustment* berikutnya mungkin terjadi, apakah ini betul-betul antisipasi penghematan yang agresif atau memang asumsi-asumsi yang kita bangun tidak mencerminkan kenyataan," jelas Legislator Dapil Jawa Tengah X tersebut.

Perlu diketahui, *Automatic adjustment* adalah penyesuaian anggaran secara otomatis yang dilakukan oleh pemerintah guna mempertahankan cadangan anggaran. Penyesuaian yang dilakukan mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu dan/atau pergeseran antar program. — uc/rdn



FOTO: MARI/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Anggaran kementerian Keuangan RI pada Rabu (15/2/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Ditengah Penerimaan Pajak yang Melebihi Target, Ada PR Besar untuk Atasi Kemiskinan di DIY

**W**akil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Cucun Ahmad Syamsurijal, menyangkan, ketika pencapaian penerimaan pajak dapat melebihi target sebesar Rp5,5 triliun atau sebesar 114,97 persen di tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan tetapi pekerjaan rumah menekan angka kemiskinan belum tercapai. Diketahui angka kemiskinan di DIY mencapai 11,5 persen, dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa.

"Ini menjadi hal yang sangat ironis, ketika angka kemiskinan tinggi menjadi anomali di tengah pemulihan ekonomi dan pulihnya aktivitas wisata. Untuk itu semua stakeholder setempat perlu adanya sinergitas dalam hal perekonomian, agar mempunyai jalan keluar guna mengurangi angka kemiskinan," demikian dikatakannya usai melakukan pertemuan di D.I. Yogyakarta, Selasa, (13/2).

Politisi PKB ini menyampaikan, bahwa dalam pertemuan hari ini, Banggar mendorong upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai katalisator aktivitas ekonomi di DIY. Ia berharap dengan adanya pemberdayaan UMKM menjadi jalan keluar mengurangi angka kemiskinan di DIY.

"Saya juga meminta kepada Kanwil Bank Indonesia DIY dan



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pertemuan dengan Kepala Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DIY beserta jajaran.

Kantor Perwakilan Kemenkeu agar dapat membantu memberikan solusi guna mengatasi kemiskinan tersebut, melalui dorongan pengembangan UMKM bagi masyarakat sekitar wilayah DIY, diharapkan dapat mengurangi angka daripada kemiskinan," ucapnya. Walaupun begitu, ia mengapresiasi, penerimaan pajak yang mampu melampaui target di tahun 2022, hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi di DIY bisa berjalan dengan baik, pasalnya penerimaan pajak tumbuh sebesar 19,24 % dari realisasi pada tahun 2021.

Dengan penerimaan pajak yang melebihi target pada tahun 2022 sebesar 114,97 persen, dan target pada tahun 2023 sebesar Rp5.444.08 miliar atau naik 13,51

persen dibandingkan tahun lalu. "Peningkatan pendapatan pajak dan pulihnya perekonomian di nilai sangat penting yang diharapkan, bisa menjadi modal bagi DIY dalam menghadapi ketidakpastian akibat tantangan ekonomi global tahun 2023 dan 2024 yang masih tetap tinggi", ucapnya Legislator Dapil Jawa Barat II.

Untuk menjaga tren pemulihan ekonomi, dan inflasi di DIY perlu adanya kordinasi dan kebijakan tim kendali untuk menjaga kondisi perekonomian DIY yang sedang tumbuh. Hal ini menjadi tugas Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tim pengendali Inflasi agar dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi terjaga.

rni/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



# BURT Tinjau RS Bethsaida Banten Guna Awasi Layanan Kesehatan Dewan

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau rumah sakit *provider* yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Salah satu rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Bethsaida di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menjelaskan kunjungan ini dalam rangka memastikan pelayanan kesehatan untuk para Anggota DPR RI beserta keluarga bisa terlaksana dengan sebaiknya-baiknya.

Menurutnya, BURT DPR RI menjalankan fungsi krusial pengawasan ini lantaran aspek kesehatan merupakan hak melekat yang dimiliki oleh para Anggota DPR RI beserta keluarga yang diatur dalam undang-undang. Pasca kunjungan, Agung menilai Rumah Sakit Bethsaida telah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

"Yang penting adalah kami mendapatkan informasi tambahan (dari Rumah Sakit Bethsaida) yang luar biasa bahwa rumah sakit ini sudah layak dan representatif untuk melayani anggota DPR beserta keluarga. Bagi kami, layanan unggulan yang diberikan juga sesuai dengan yang dibutuhkan," ucap Agung usai meninjau Rumah Sakit Bethsaida, Selasa (14/2).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap dengan kehadiran Rumah Sakit Bethsaida ini bisa membuka akses kesehatan yang lebih mudah



FOTO: TS/PDT

**Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat meninjau Rumah Sakit Bethsaida, Selasa (14/2/2023).**

dan tanggap untuk para Anggota DPR RI beserta keluarga yang khususnya tinggal di kawasan Kabupaten Tangerang. "Kami melihat Rumah Sakit Bethsaida juga sudah sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)* yang kami harapkan. Tentunya, dalam kunjungan kali ini, setiap fasilitas yang diberikan telah mendukung kesehatan yang diharapkan," pungkas Agung.

Sebagai informasi, Rumah Sakit

”

**BAGI KAMI, LAYANAN  
UNGGULAN YANG  
DIBERIKAN JUGA  
SESUAI DENGAN YANG  
DIBUTUHKAN.**

Bethsaida telah memberikan layanan kesehatan selama 10 tahun dengan didukung oleh dokter spesialis dan sub spesialis di bidangnya. Memiliki motto 'Hospital with Heart', rumah sakit tersebut berkomitmen untuk konsisten meningkatkan kualitas pelayanan aktif untuk masyarakat.

Adapun pelayanan kesehatan unggulan yang disediakan oleh Rumah Sakit Bethsaida di antaranya *Neuroradiology Center, Cardiac Center, Brain & Spine Center, Hyperbaric Center, Disgentive Center, Dental Center, Aesthetic Center, dan Trauma Center*. Selain itu, Rumah Sakit Bethsaida juga memiliki layanan penunjang seperti layanan 24 jam IGD yang dilengkapi fasilitas evakuasi medis darat dan udara, rehabilitasi medik, unit kateterisasi, dan unit hemodialisa. **ts,ftn/rdn**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# BAKN DPR Minta Kemenkeu Ubah Regulasi DBHCHT Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumen



FOTO:NDY/PDT

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin pertemuan dengan Kepala Kanwil Bea Cukai Banten dan Kepala Kantor Pelayanan Unit Bea Cukai Soekarno Hatta beserta jajaran, di Tangerang, Banten, Senin (6/2/2023).

**K**etua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menilai, jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Provinsi Banten sangat kecil dan tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah Provinsi Banten itu sendiri. Apalagi Banten juga bukan daerah penghasil tembakau seperti daerah penghasil lainnya.

"Kita berharap, harus ada perbaikan dari peraturan kementerian keuangan terkait pemanfaatan DBHCHT ini, sehingga daerah yang merupakan penghasil DBHCHT dengan daerah yang konsumen itu bisa mendapatkan perlakuan yang seimbang," katanya usai memimpin pertemuan dengan Kepala Kanwil

”

**KITA BERHARAP, HARUS ADA PERBAIKAN DARI PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN TERKAIT PEMANFAATAN DBHCHT INI, SEHINGGA DAERAH YANG MERUPAKAN PENGHASIL DBHCHT DENGAN DAERAH YANG KONSUMEN ITU BISA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SEIMBANG,**

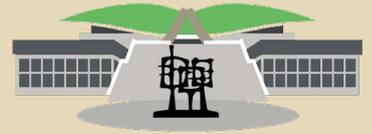
Bea Cukai Banten dan Kepala Kantor Pelayanan Unit Bea Cukai Soekarno Hatta beserta jajaran di Banten, Senin (6/2/2023).

Wahyu, biasa ia disapa melanjutkan, DBHCHT yang diterima Bea Cukai Soekarno Hatta hanya sebesar 680 juta, menurutnya jika hal ini dibagi dengan program lainnya, misalnya 10 persennya digunakan untuk dana pengawasan, hal itu dipandang tidak cukup dengan cakupan luas wilayah Banten. Untuk itu sekali lagi ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan regulasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen, karena menurutnya yang jauh lebih penting adalah pemanfaatan dari DBHCHT itu yang harus lebih efektif, efisien dan tentunya berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu terkait dengan masalah Bea Cukai dan Dana Bagi Hasil Bea Cukai, dari sisi pendapatan negara, Wahyu menilai dirinya cukup optimis bahwa Indonesia bisa melampaui resesi, mengingat dari hasil kunjungan BAKN DPR RI ke Bea Cukai seluruh Indonesia terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Terakhir, dirinya mengingatkan pihak Bea Cukai Soetta bahwa memang perlu ada perbaikan peningkatan pelayanan, namun perhatikan juga sektor pengawasan, utamanya dari masuknya barang-barang yang dilarang seperti minuman keras dan narkoba. **ndy/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Anggota DPR RI Herman Khaeron (dua dari kiri) dalam sesi foto bersama usai saat hadir dalam konferensi pers KWP Cup 2023 di Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2023). FOTO:RSB/PDT



Rapat Pertanggungjawaban Pengurus Anggota P3S di Aula Serba Guna Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). FOTO: PRIMA



Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat berfoto bersama dengan para pegawai jabatan fungsional usai dilantik di Lobi Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Foto: Rsb/Pdt FOTO:RSB/PDT